

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	6
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	7
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	7
2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan	11
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	12
3.1 Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD	12
3.1.1 Pendapatan-LRA	12
3.1.2 Belanja-LRA	24
3.1.3 Pembiayaan-LRA	32
3.1.4 Pendapatan-LO	34
3.1.5 Beban-LO	39
3.1.6 Aset	40
3.1.7 Kewajiban	60
3.1.8 Ekuitas Dana	63
3.2 Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD.	64
BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	65
BAB V PENUTUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya, Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas, Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu

entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900,1,15,5,-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD
 Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, secara sistematis terdiri dari:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA
 KEUANGAN SKPD
 - BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN
 KEUANGAN SKPD
 - BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
 NON KEUANGAN SKPD
 - BAB V : PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini disajikan guna memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan BPKPAD dalam merealisasikan anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan, APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 dan telah melakukan perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Ringkasan Perubahan APBD BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 2.1.1.

Tabel 2.1.1

Ringkasan Perubahan APBD BPKPAD Kabupaten Temanggung

Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
5.02.0.00.0 .00.04.000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah		
4	PENDAPATAN DAERAH	1.742.281.873.825,00	1.821.480.900.547,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	110.796.447.497,00	110.192.504.654,00
4.1.01	Pajak Daerah	76.510.647.700,00	78.370.855.400,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.109.728.797,00	22.645.578.254,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.176.071.000,00	9.176.071.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.631.485.426.328,00	1.709.288.395.893,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.501.341.698.149,00	1.514.212.471.632,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	130.143.728.179,00	195.075.924.261,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	2.000.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	2.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.742.281.873.825,00	1.821.480.900.547,00
5	BELANJA DAERAH	429.521.633.011,00	428.777.230.407,00
5.1	BELANJA OPERASI	26.705.501.886,00	22.155.523.282,00

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
5.1.01	Belanja Pegawai	23.088.164.986,00	18.230.599.382,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.617.336.900,00	3.924.923.900,00
5.2	BELANJA MODAL	34.800.000,00	81.360.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.800.000,00	81.360.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.850.000.000,00	1.150.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.850.000.000,00	1.150.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	399.931.331.125,00	405.390.347.125,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.777.498.770,00	8.777.498.770,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	391.153.832.355,00	396.612.848.355,00
	Jumlah Belanja	429.521.633.011,00	428.777.230.407,00
	Total Surplus/(Defisit)	1.312.760.240.814,00	1.392.703.670.140,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	117.543.103.766,00	82.562.821.470,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	114.088.073.766,00	79.107.791.470,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	3.455.030.000,00	3.455.030.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	117.543.103.766,00	82.562.821.470,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	65.000.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	65.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	65.000.000.000,00
	Pembiayaan Neto	117.543.103.766,00	17.562.821.470,00

Pada Tahun Anggaran 2024, BPKPAD Kabupaten Temanggung melakukan Perubahan APBD sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

Adapun Realisasi Anggaran Tahun 2024 merupakan ukuran kinerja keuangan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 yang ditampilkan dalam Tabel 2.1.2 sebagai berikut:

Tabel 2.1.2
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persen tase (%)
5.02.0.00.0.00.04.000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah			
4	PENDAPATAN DAERAH	1.821.480.900.547,00	1.821.722.164.482,00	100,01
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	110.192.504.654,00	109.100.411.420,00	99,01
4.1.01	Pajak Daerah	78.370.855.400,00	76.926.746.042,00	98,16
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.645.578.254,00	22.645.578.254,00	100
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.176.071.000,00	9.528.087.124,00	103,84
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.709.288.395.893,00	1.710.621.753.062,00	100,08
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.514.212.471.632,00	1.525.673.694.150,00	100,76
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	195.075.924.261,00	184.948.058.912,00	94,81
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100
	Jumlah Pendapatan	1.821.480.900.547,00	1.821.722.164.482,00	100,01
5	BELANJA DAERAH	428.777.230.407,00	425.453.919.079,00	99,23
5.1	BELANJA OPERASI	22.155.523.282,00	20.707.265.554,00	93,46
5.1.01	Belanja Pegawai	18.230.599.382,00	17.452.076.076,00	95,73
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.924.923.900,00	3.255.189.478,00	82,94
5.2	BELANJA MODAL	81.360.000,00	71.683.000,00	88,11
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.360.000,00	71.683.000,00	88,11
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	100
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.150.000.000,00	0,00	0
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.150.000.000,00	0,00	0
5.4	BELANJA TRANSFER	405.390.347.125,00	404.674.970.525,00	99,82
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.777.498.770,00	8.753.922.170,00	99,73
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	396.612.848.355,00	395.921.048.355,00	99,83
	Total Surplus/(Defisit)	1.392.703.670.140,00	1.396.268.245.403,00	100,26

Target pendapatan dalam APBD BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.821.480.900.547,00 dengan realisasi sebesar Rp1.821.722.164.482,00 atau dengan capaian realisasi sebesar 100,01%, Realisasi pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp109.100.411.420,00 atau mencapai 99,01% dari target anggaran sebesar Rp110.192.504.654,00. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.710.621.753.062,00 atau mencapai 100,08% dari target anggaran sebesar Rp1.709.288.395.893,00. Jika digunakan indikator persentase capaian target anggaran pendapatan sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan sangat baik (0%-100%), secara keseluruhan dapat dikategorikan kinerja keuangan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2024 yang mencapai 100,01% termasuk dalam kategori baik. Faktor pendorong tercapainya target yaitu:

- (1) Melakukan komunikasi secara aktif kepada wajib pajak
- (2) Melakukan pemeriksaan pajak
- (3) Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan melakukan monitoring dan evaluasi ke petugas di tingkat desa
- (4) Menerbitkan surat tagihan pajak
- (5) Kemudahan pembayaran dengan disediakan EDC bagi petugas di lapangan maupun di loket pelayanan
- (6) Dibukanya mall pelayanan publik
- (7) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah

APBD BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 menetapkan jumlah anggaran belanja daerah sebesar Rp428.777.230.407,00 dengan realisasi sebesar Rp425.453.919.079,00 atau mencapai 99,23% dari anggaran. Realisasi belanja daerah tersebut terdiri dari Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp20.707.265.554,00 atau mencapai 93,46% dari anggaran sebesar Rp22.155.523.282,00; Belanja Modal sebesar Rp71.683.000,00 atau mencapai 88,11%; Belanja Tak Terduga sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran sebesar Rp1.150.000.000,00; dan Belanja Transfer sebesar Rp404.674.970.525,00 atau mencapai 99,82% dari anggaran sebesar Rp405.390.347.125,00. Jika digunakan indikator persentase capaian penyerapan belanja daerah sebagai skala pengukuran kinerja keuangan belanja

daerah dari yang sangat buruk sampai dengan sangat baik (0%-100%), secara keseluruhan dapat dikategorikan kinerja TA 2024 dari penyerapan belanja daerah yang mencapai sebesar 99,23%, termasuk kategori baik.

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Dalam Pencapaian target kegiatan, terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya target kegiatan, antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah
- (2) Kurangnya sosialisasi secara masif oleh perangkat daerah
- (3) Sanksi masih sebatas sanksi administratif, belum dilaksanakan secara konkrit karena belum tersedianya pegawai yang memiliki kewenangan
- (4) Data yang tidak akurat, Data dasar pengenaan pajak seringkali tidak akurat, misalnya ada wajib atau objek pajak yang belum terdata atau wajib pajak melaporkan tidak sesuai dengan yang ada
- (5) Masih rendahnya kerjasama antar OPD untuk upaya bersama dalam rangka peningkatan pendapatan daerah

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1 Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp1.821.722.164.482,00 atau 100,01% dari target yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp1.821.480.900.547,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.1

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah-LRA TA 2024

No	PENDAPATAN	Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023 (Rp)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	PENDAPATAN DAERAH	1.821.480.900.547,00	1.821.722.164.482,00	100,01	1.763.928.501.710,00
1,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	110.192.504.654,00	109.100.411.420,00	99,01	110.341.183.483,00
2,	PENDAPATAN TRANSFER	1.709.288.395.893,00	1.710.621.753.062,00	100,08	1.653.587.318.227,00
3,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100	0,00

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebesar Rp1.821.722.164.482,00 atau 100,01% dari target sebesar Rp1.821.480.900.547,00 Hal ini disebabkan karena: Kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 99,01% dan Pendapatan Transfer sebesar 100,08%.

Apabila dibandingkan pendapatan tahun 2023 sebesar Rp1.763.928.501.710,00 maka terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp57.793.662.772,00 atau 3,28% dari tahun 2023, Adapun realisasi masing-masing jenis Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.100.411.420,00 atau 0,99% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp110.192.504.654,00. PAD disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2024

No	PENDAPATAN	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	110.192.504.654,00	109.100.411.420,00	99,01	110.341.183.483,00
1,	Pajak Daerah	78.370.855.400,00	76.926.746.042,00	98,16	79.677.967.921,00
2,	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.645.578.254,00	22.645.578.254,00	100	21.311.076.903,00
3,	Lain-lain PAD yang Sah	9.176.071.000,00	9.52.087.124,00	103,84	9.352.138.659,00

Realisasi masing-masing jenis PAD tahun anggaran 2024 dan 2023 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1.1.1 PENDAPATAN PAJAK DAERAH-LRA

PAD yang berasal dari pendapatan pajak daerah BPKPAD Kabupaten Temanggung meliputi pendapatan dari pajak reklame, pajak air tanah, PBB-P2, BPHTB serta PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) yang dikelola oleh Bidang Pendapatan BPKPAD. Realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp76.926.746.042,00 atau 98,16% dari target yang ditetapkan sebesar Rp78.370.855.400.00 dengan demikian realisasi pajak daerah tahun anggaran 2024 kurang mencapai target sebesar Rp1.444.109.358,00 atau 1,84%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp2.751.221.879,00) atau (3,45%) jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp79.677.967.921,00. Lebih rinci mengenai realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2024 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2024

No	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	PAJAK DAERAH	78.370.855.400,00	76.926.746.042,00	98,16	79.677.967.921,00
1,	Pajak Hotel	0,00	0,00	0	280.879.388,00
2,	Pajak Restoran	0,00	0,00	0	3.486.119.798,00
3,	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0	98.912.750,00
4,	Pajak Reklame	900.000.000,00	1.056.546.053,00	117,39	1.007.387.934,00
5,	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0	21.913.140.117,00
6,	Pajak Parkir	0,00	0,00	0	150.060.151,00
7,	Pajak Air Tanah	350.576.300,00	428.407.635,00	122,20	320.787.735,00
8,	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	26.000.000.000,00	28.257.247.150,00	108,68	26.628.055.685,00
9,	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	23.000.000.000,00	17.572.220.275,00	76,41	25.792.624.363,00
10,	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	28.120.279.100,00	29.612.324.929,00	105,31	0,00

Realisasi penerimaan pajak daerah TA 2024 sebagian telah melampaui target. Jika dibandingkan dengan TA 2023, Pendapatan TA 2024 mengalami penurunan karena tarif pajak daerah turun, namun target di beberapa jenis pajak dapat tercapai, Maka kinerja keuangan Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dapat dikatakan baik. Adapun pajak yang tidak tercapai sebagai berikut:

1. Hiburan

Pendapatan pajak hiburan menurun yang disebabkan oleh menurunnya realisasi dari wajib pajak hiburan Insidentil (konser Musik) di Tahun 2024 yang memberi kontribusi besar, seperti contoh di Tahun 2023 ada konser NDX dengan pembayaran pajak sebesar Rp8.512.500,00, serta konser Gilga dan SHA sebesar Rp11.131.200,00., sedang ditahun 2022 ada konser Denny Caknan yang membayar pajak hiburan sebesar Rp. 15.000.000,-

2. BPHTB
- a. Berkurangnya jumlah Wajib Pajak ditahun 2024 sejumlah 3.138 pemohon, di Tahun 2023 sejumlah 3.672 dan tahun 2022 sejumlah 3.797 pemohon

b. Penerapan dari NPOPTKP sesuai aturan baru dari 60.000.000,00 menjadi 80.000.000,00.

c. Sudah tidak ada lagi pembubuhan stempel terhutang BPHTB pada sertifikat hasil produk PTSL oleh BPN Temanggung, sejak Tahun 2022 yang mengakibatkan pemohon sertifikat PTSL tidak merasa memiliki kewajiban untuk mengurus BPHTBnya, selain itu mulai tahun 2024 fitur blokir yang dilakukan oleh BPN atas sertifikat hasil PTSL tidak diterapkan lagi, sehingga sertifikat hasil PTSL bisa langsung dipergunakan untuk agunan Perbankan tanpa harus menyelesaikan pengurusan BPHTB.

3.1.1.1.2 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN-LRA

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang diperoleh BPKPAD Kabupaten Temanggung bersumber dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD. Pada TA 2024 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sebesar Rp22.645.578.254,00 dengan realisasi sebesar Rp22.645.578.254,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4

Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA TA 2024

No	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	22.645.578.254,00	22.645.578.254,00	100	21.311.076.903,00
1,	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada	17.288.144.970,00	17.288.144.970,00	100	15.933.744.748,00

	BUMD (Lembaga Keuangan)				
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	754.746.609,00	754.746.609,00	100	171.787.315,00
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	4.602.686.675,00	4.602.686.675,00	100	5.205.544.840,00

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 mengalami kenaikan dibandingkan penerimaan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp1.334.501.351,00 atau 6,26% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp21.311.076.903,00.

3.1.1.1.3 LAIN-LAIN PAD YANG SAH-LRA

Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp9.176.071.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.528.087.124,00 atau sebesar 103,84% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah-LRA TA 2024

No	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	9.176.071.000,00	9.528.087.124,00	103,84	9.352.138.659,00
1,	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0	405.608.200,00
2,	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.978.408.200,00	1.980.670.442,00	100,11	1.898.996.944,00
3,	Jasa Giro	467.911.200,00	307.524.577,00	65,72	309.851.264,00
4,	Pendapatan Bunga	5.406.164.200,00	5.392.673.662,00	99,75	5.135.033.596,00
5,	Penerimaan atas	13.250.000,00	2.475.000,00	18,68	14.600.000,00

	Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah				
6,	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	220.000.000,00	78.249.381,00	35,57	469.938.947,00
7,	Pendapatan Denda Pajak Daerah	90.337.400,00	113.120.719,00	125,22	333.269.344,00
8,	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00	1.653.373.343,00	165,34	784.840.364,00

Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp175.948.465,00 atau 1,88% dibandingkan penerimaan TA 2023 sebelumnya yaitu sebesar Rp9.352.138.659,00.

3.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER-LRA

Pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu. Pada tahun 2024 pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp1.709.288.395.893,00 dengan realisasi sebesar Rp1.710.621.753.062,00 atau mencapai 99,92% dari anggaran. Jika dibanding dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.653.587.318.227,00 pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar Rp57.034.434.835,00 atau 3,45%, Rincian pendapatan transfer tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer-LRA TA 2024

No	PENDAPATAN	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	PENDAPATAN TRANSFER	1.709.288.395.893,00	1.710.621.753.062,00	100,08	1.653.587.318.227,00
1,	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.514.212.471.632,00	1.525.673.694.150,00	100,76	1.517.163.835.087,00
2,	Pendapatan Transfer Antar Daerah	195.075.924.261,00	184.948.058.912,00	94,81	136.423.483.140,00

3.1.1.2.1 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LRA

Pada tahun 2024 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp1.514.212.471.632,00 dengan realisasi sebesar Rp1.525.673.694.150,00 atau

mencapai 100,76% dari anggaran. Jika dibanding dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.517.163.835.087,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp8.509.859.063,00 atau 0,56%.

Rincian pendapatan transfer tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA TA 2024

No	PENDAPATAN TRANSFER	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.514.212.471.632,00	1.525.673.694.150,00	100,76	1.517.163.835.087,00
1,	Dana Perimbangan	1.239.020.475.632,00	1.250.481.698.150,00	100,93	1.245.317.994.087,00
2,	Insentif Fiskal	28.501.104.000,00	28.501.104.000,00	100	29.383.259.000,00
3,	Dana Desa	246.690.892.000,00	246.690.892.000,00	100	242.462.582.000,00

3.1.1.2.1.1 DANA PERIMBANGAN-LRA

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat (APBN) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Pada TA 2024 pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan dianggarkan sebesar Rp1.239.020.475.632,00 dengan realisasi sebesar Rp1.250.481.698.150,00 atau mencapai 100,93% dari yang dianggarkan. Jika dibanding dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.245.317.994.087,00 pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp5.163.704.063,00 atau 0,42%.

Tabel 3.8

Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan-LRA TA 2024

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	DANA PERIMBANGAN	1.239.020.475.632,00	1.250.481.698.150,00	100,93	1.245.317.994.087,00
1,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	73.761.642.753,00	69.727.710.589,00	94,53	75.150.038.079,00
2,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	820.750.031.000,00	843.895.369.956,00	102,82	791.039.886.585,00
3,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	71.224.680.000,00	67.587.633.850,00	94,89	109.544.079.906,00
4,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	273.284.121.879,00	269.270.983.755,00	98,53	269.583.989.517,00

Penjelasan :

- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan Pendapatan dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (ketimpangan vertikal). Persentase dana bagi hasil (DBH) Pajak untuk setiap sumber dimuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penetapan alokasi DBH pajak dilakukan melalui peraturan menteri keuangan. Pendapatan bagi hasil pajak yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), Cukai Hasil Tembakau dan Sumber Daya Alam. Transfer dana perimbangan pemerintah pusat-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2024 dianggarkan sebesar Rp73.761.642.753,00 dengan realisasi sebesar Rp69.727.710.589,00 atau 94,53% dari anggaran. Realisasi penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan sebesar (Rp5.422.327.490,00) atau (7,22%) dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp75.150.038.079,00.

- Transfer dana alokasi umum (DAU) yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah bertujuan meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan DAU dimaksud ditetapkan oleh daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing. Transfer Dana Perimbangan Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 dianggarkan sebesar Rp820.750.031.000,00 dengan realisasi sebesar Rp843.895.369.956,00 atau 102,82% dari anggaran. Realisasi Penerimaan DAU TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp52.855.483.371,00 atau 6,68% dibandingkan dengan penerimaan TA 2023 sebesar Rp791.039.886.585,00.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer Dana Perimbangan Pemerintah Pusat-DAK Fisik TA 2024 dianggarkan sebesar Rp71.224.680.000,00 dengan realisasi sebesar Rp67.587.633.850,00 atau 94,89% dari anggaran. Realisasi Penerimaan Transfer Dana Perimbangan Pemerintah Pusat-DAK Fisik mengalami penurunan sebesar (Rp41.956.446.056,00) atau (38,30%) bila dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp109.544.079.906,00.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer Dana Perimbangan Pemerintah Pusat-DAK Non Fisik TA 2024 dianggarkan sebesar Rp273.284.121.879,00 dengan realisasi sebesar Rp269.270.983.755,00 atau 98,53% dari anggaran. Realisasi Penerimaan Transfer Dana Perimbangan Pemerintah Pusat-DAK Non Fisik mengalami peningkatan sebesar Rp313.005.762,00 atau 0,12% bila dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp269.583.989.517,00.

3.1.1.2.1.2 INSENTIF FISKAL-LRA

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Insentif Fiskal dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat yang pada Tahun 2023 bernama Dana Insentif Daerah (DID). Pendapatan dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan berupa

Insentif Fiskal pada TA 2024 dengan anggaran Rp28.501.104.000,00 telah terealisasi sepenuhnya atau 100,00%. Dari realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 dengan nama Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp29.383.259.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp882.155.000,00) atau (3,01%). Rincian Insentif Fiskal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9

Anggaran dan Realisasi Insentif Fiskal-LRA TA 2024

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023 (DID)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Insentif Fiskal	28.501.104.000,00	28.501.104.000,00	100	29.383.259.000,00
1,	Insentif Fiskal	28.501.104.000,00	28.501.104.000,00	100	29.383.259.000,00

3.1.1.2.1.3 DANA DESA-LRA

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa sebagai komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dana Desa ditujukan untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa; mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal; meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa; mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa; meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Anggaran Dana Desa pada TA 2024 sebesar Rp246.690.892.000,00 dan terealisasi sepenuhnya atau 100,00%. Jika dibandingkan Realisasi TA 2023 sebesar Rp242.462.582.000,00 dapat dikatakan naik sebesar Rp4.228.310.000,00 atau 1,74%.

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Dana Desa-LRA TA 2024

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Dana Desa	246.690.892.000,00	246.690.892.000,00	100	242.462.582.000,00
1,	Dana Desa	246.690.892.000,00	246.690.892.000,00	100	242.462.582.000,00

3.1.1.2.2 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH -LRA

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada TA 2024 merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi. Pendapatan tersebut dianggarkan sebesar Rp195.075.924.261,00 dengan realisasi sebesar Rp184.948.058.912,00 atau 94,81%. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp48.524.575.772,00 atau 35,57% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp136.423.483.140,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA TA 2024

No	PENDAPATAN TRANSFER	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	195.075.924.261,00	184.948.058.912,00	94,81	136.423.483.140,00
1,	Pendapatan Bagi Hasil	135.108.625.261,00	125.426.694.912,00	92,83	123.749.375.637,00
2,	Bantuan Keuangan	59.967.299.000,00	59.521.364.000,00	99,26	12.674.107.503,00

3.1.1.2.2.1 PENDAPATAN BAGI HASIL-LRA

Pendapatan bagi hasil adalah Pendapatan bagi hasil pajak atas pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pendapatan bagi hasil TA 2024 sebesar Rp125.426.694.912,00 atau 92,83% dari anggaran sebesar Rp135.108.625.261,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp123.749.375.637,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.677.319.275,00 atau 1,36%.

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2024

No	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Pendapatan Bagi Hasil	135.108.625.261,00	125.426.694.912,00	92,83	123.749.375.637,00
1,	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	135.108.625.261,00	125.426.694.912,00	92,83	123.749.375.637,00

3.1.1.2.2.2 BANTUAN KEUANGAN-LRA

Bantuan keuangan BPKPAD Kabupaten Temanggung TA 2024 adalah bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp59.967.299.000,00 yang terealisasi sebesar Rp59.521.364.000,00 atau 99,26%. Dibandingkan dengan TA 2023 dengan realisasi sebesar Rp12.674.107.503,00 mengalami kenaikan sebesar Rp46.847.256.497,00 atau 369,63%.

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LRA TA 2024

No	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Bantuan Keuangan	59.967.299.000,00	59.521.364.000,00	99,26	12.674.107.503,00
1,	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	59.967.299.000,00	59.521.364.000,00	99,26	12.674.107.503,00

3.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2024 dianggarkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.000.000.000,00 atau sebesar 100,00%. Sedangkan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan oleh OPD masing-masing.

Tabel 3.14

Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA TA 2024

No	PENDAPATAN DAERAH	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100	0,00
1,	Pendapatan Hibah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100	0,00
2,	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0	0,00

3.1.1.3.1 PENDAPATAN HIBAH-LRA

Pendapatan Hibah – LRA merupakan Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, pada TA 2024 tidak ada pendapatan Hibah pada BPKPAD Kabupaten Temanggung, sedang Pendapatan Hibah pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.000.000.000,00 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.15

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah-LRA TA 2024

No	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	PENDAPATAN HIBAH	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100	0,00
1,	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100	0,00

3.1.2 BELANJA-LRA

Belanja Daerah adalah belanja yang ada dalam LRA dengan realisasi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 dan telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebesar

Rp425.453.919.079,00 atau 99,22% dari anggaran Rp428.777.230.407,00. Belanja Daerah BPKPAD Kabupaten Temanggung TA 2024 berdasarkan jenis kelompoknya terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer dengan anggaran dan realisasi yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah-LRA TA 2024

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	BELANJA DAERAH	428.777.230.407,00	425.453.919.079,00	99,20	427.610.626.681,00
1,	BELANJA OPERASI	22.155.523.282,00	20.707.265.554,00	93,46	20.437.722.246,00
2,	BELANJA MODAL	81.360.000,00	71.683.000,00	88,11	12.250.000,00
3,	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.150.000.000,00	0,00	0	0,00
4,	BELANJA TRANSFER	405.390.347.125,00	404.674.970.525,00	99,82	407.160.654.435,00

Realisasi belanja daerah TA 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp2.156.707.602,00) atau turun (0,50%) dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp427.610.626.681,00 dikarenakan pada kegiatan belanja transfer di Tahun 2024 sebesar Rp404.674.970.525,00 sedang di Tahun 2023 sebesar Rp407.160.654.435,00 meskipun belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp59.433.000,00 dan belanja operasi sebesar Rp269.543.308,00.

3.1.2.1 BELANJA OPERASI-LRA

Belanja Operasi dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp20.707.265.554,00 atau 93,46% dari anggaran sebesar Rp22.155.523.282,00. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari Rp17.452.076.076,00 (95,73%) realisasi belanja pegawai dan Rp3.255.189.478,00 (82,94%) realisasi belanja barang dan jasa. Terdapat koreksi pengembalian atas belanja operasi (Belanja Pegawai) sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Pengembalian atas kelebihan bayar tunjangan fungsional a,n, Qoidatun Nadhiroh S, S,E,,M,M, Juli 2024 karena mutasi Juni 2024 dari perencana ahli muda BPKPAD ke Jabatan Kabid Diklat dan Pembinaan BKPSDM Temanggung	120.000,00

Pengembalian atas kelebihan bayar tunjangan jabatan a,n, Ferry Wisnucahyo B, S,E, bulan Juli 2024 karena mutasi Juni 2024	440.000,00
Pengembalian atas kelebihan belanja insentif ASN atas BPHTB a,n, Ferry Wisnucahyo, B,S,E,, M,M,, Eko Medi Susanto, S,ST,, M,M,, Qoidatun Nadhiroh Setianingsih, S,E,, M,M,, Budi Santosa dan Jauza Kharisma Fityana, A,Md,Ak,	17.595.000,00
Pengembalian atas kelebihan belanja insentif ASN atas BPHTB	173.305.000,00
Pengembalian atas kelebihan belanja insentif KDH/WKDH atas BPHTB	23.000.000,00
JUMLAH	214.460.000,00

Tabel 3.17

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi-LRA TA 2024

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	BELANJA OPERASI	22.155.523.282,00	20.707.265.554,00	93,46	20.437.722.246,00
1,	Belanja Pegawai	18.230.599.382,00	17.452.076.076,00	95,73	16.723.736.915,00
2,	Belanja Barang dan Jasa	3.924.923.900,00	3.255.189.478,00	82,94	3.713.985.331,00

Realisasi belanja Operasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp269.543.308,00 atau naik 1,32% dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp20.437.722.246,00.

3.1.2.1.1 BELANJA PEGAWAI-LRA

Belanja Pegawai TA 2024 dianggarkan sebesar Rp18.230.599.382,00 dengan realisasi sebesar Rp17.452.076.076,00 atau 95,73% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.18

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai-LRA TA 2024

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	BELANJA PEGAWAI	18.230.599.382,00	17.452.076.076,00	95,73	16.723.736.915,00
1,	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.677.227.964,00	10.201.921.835,00	95,55	10.067.141.912,00
2,	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.748.569.000,00	2.712.527.987,00	98,69	2.676.753.978,00
3,	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.335.681.174,00	4.141.165.358,00	95,51	3.320.878.525,00
4,	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	469.121.244,00	396.460.896,00	84,51	658.962.500,00

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai TA 2023 maka dapat dikatakan mengalami kenaikan sebesar Rp728.339.161,00 atau naik 4,36%.

3.1.2.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA - LRA

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dianggarkan sebesar Rp3.924.923.900,00 dengan realisasi sebesar Rp3.255.189.478,00 atau 82,94% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.19

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA TA 2024

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	BELANJA BARANG DAN JASA	3.924.923.900,00	3.255.189.478,00	82,94	3.713.985.331,00
1,	Belanja Barang	1.056.810.600,00	809.012.042,00	76,55	807.594.223,00
2,	Belanja Jasa	2.105.074.300,00	1.785.506.514,00	84,82	2.361.634.701,00
3,	Belanja Pemeliharaan	278.412.000,00	245.079.947,00	88,03	59.181.100,00
4,	Belanja Perjalanan Dinas	329.627.000,00	262.359.340,00	79,59	240.249.547,00
5,	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	155.000.000,00	153.231.635,00	98,86	245.325.760,00

Realisasi belanja Barang dan Jasa TA 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp458.795.853,00) atau turun (12,35%) dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp3.713.985.331,00

3.1.2.2 BELANJA MODAL-LRA

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Modal senilai Rp71.683.000,00 atau 88,11% dari anggaran Rp81.360.000,00. Realisasi Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.20

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-LRA TA 2024

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	BELANJA MODAL	81.360.000,00	71.683.000,00	88,11	12.250.000,00
1,	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.360.000,00	71.683.000,00	88,11	12.250.000,00

Realisasi belanja modal TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp59.433.000,00 atau naik 485,17% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp12.250.000,00 hal ini disebabkan karena Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

<u>Keterangan</u>	<u>Jumlah</u>
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Mesin Antrian Digital)	16.983.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (UPS)	5.550.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Air Conditioner)	15.600.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Meteran Air)	33.550.000,00
JUMLAH	71.683.000,00

3.1.2.2.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN-LRA

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pembentukan modal; seperti pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud atau barang inventaris dengan nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi (1 tahun), termasuk di dalamnya menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.21

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-LRA TA 2024

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	81.360.000,00	71.683.000,00	88,11	12.250.000,00
1,	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	35.000.000,00	32.583.000,00	93,09	12.250.000,00
2,	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.560.000,00	5.550.000,00	73,41	0,00
3,	Belanja Modal Komputer	4.000.000,00	0,00	0	0,00
4,	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	34.800.000,00	33.550.000,00	96,41	0,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp59.433.000,00 atau 485,17% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp12.250.000,00. Tahun 2024 belanja modal peralatan dan mesin menambah belanja Mesin Antrian Digital, UPS, Air Conditioner, dan Meteran Air dengan nilai Rp71.683.000,00.

3.1.2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA-LRA

Belanja Tak Terduga dialokasikan dalam APBD dalam upaya penanganan atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah. Belanja Tak Terduga TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.150.000.000,00 dan tidak ada realisasi kegiatan tersebut.

Tabel 3.23

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga-LRA TA 2024

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.150.000.000,00	0,00	0	0,00
1,	Belanja Tidak Terduga	1.150.000.000,00	0,00	0	0,00

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran senilai Rp1.150.000.000,00 tidak ada realisasi dikarenakan tidak adanya penanganan atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah di Tahun 2024.

3.1.2.4 BELANJA TRANSFER-LRA

Belanja Transfer TA 2024 dianggarkan sebesar Rp405.390.347.125,00 dengan realisasi sebesar Rp404.674.970.525,00 atau 99,82% dari anggaran.

Tabel 3.24

Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer-LRA TA 2024

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	BELANJA TRANSFER	405.390.347.125,00	404.674.970.525,00	99,82	407.160.654.435,00
1,	Belanja Bagi Hasil	8.777.498.770,00	8.753.922.170,00	99,73	7.985.769.628,00
2,	Belanja Bantuan Keuangan	396.612.848.355,00	395.921.048.355,00	99,83	399.174.884.807,00

Belanja Transfer TA 2024 dengan realisasi sebesar Rp404.674.970.525,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp407.160.654.435,00 dapat dikatakan mengalami penurunan sebesar (Rp2.485.683.910,00) atau (0,61%).

3.1.2.4.1 BELANJA BAGI HASIL-LRA

Belanja Bagi Hasil TA 2024 dianggarkan sebesar Rp8.777.498.770,00 dengan realisasi sebesar Rp8.753.922.170,00 atau 99,73% dari nilai anggaran. Belanja Bagi Hasil TA 2024 dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.25

Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil-LRA TA 2024

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	BELANJA BAGI HASIL	8.777.498.770,00	8.753.922.170,00	99,73	7.985.769.628,00
1,	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7.651.064.770,00	7.651.064.770,00	100	6.951.000.000,00
2,	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.126.434.000,00	1.102.857.400,00	97,91	1.034.769.628,00

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp7.985.769.628,00 maka dapat dikatakan Belanja Bagi Hasil naik Rp768.152.542,00 atau 9,62%.

3.1.2.4.2 BELANJA BANTUAN KEUANGAN-LRA

Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp396.612.848.355,00 dengan realisasi sebesar Rp395.921.048.355,00 atau 99,83% dari anggaran.

Tabel 3.26

Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan-LRA TA 2024

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Bantuan Keuangan	396.612.848.355,00	395.921.048.355,00	99,83	399.174.884.807,00
1,	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	396.612.848.355,00	395.921.048.355,00	99,83	399.174.884.807,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp3.253.836.452,00) atau (0,82%) dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp399.174.884.807,00. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa, Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa, dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

Surplus (Defisit)

Surplus TA 2024 adalah sebesar Rp1.396.268.245.403,00 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan	Rp 1.821.722.164.482,00
Belanja	<u>Rp 425.453.919.079,00</u>
Surplus / (Defisit)	Rp Rp1.396.268.245.403,00

3.1.3 PEMBIAYAAN-LRA

Pembiayaan terdiri dari dua pos yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada Tahun 2024 penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp82.562.821.470,00 dengan realisasi sebesar Rp82.914.152.285,00 atau 99,57% sedangkan pengeluaran pembiayaan Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp65.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp65.115.044.212,00 atau 100,18%. Pembiayaan TA 2024 dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.27

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan-LRA TA 2024

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1,	Penerimaan Pembiayaan	82.562.821.470,00	82.914.152.285,00	99,57	150.212.200.828,00
2,	Pengeluaran Pembiayaan	65.000.000.000,00	65.115.044.212,00	100,18	1.999.548.272,00

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp150.212.200.828,00 maka dapat dikatakan penerimaan pembiayaan berkurang (Rp67.298.048.543,00) atau (44,80%) sedangkan pengeluaran pembiayaan mengalami kenaikan sebesar Rp63.000.451.728,00 dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.999.548.272,00.

3.1.3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN-LRA

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.28

Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan-LRA TA 2024

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Penerimaan Pembiayaan	82.562.821.470,00	82.914.152.285,00	99,57	399.174.884.807,00
1,	Sisa Lebih	79.107.791.470,00	79.107.791.470,00	100	148.607.977.520,00

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				
2,	Pencairan Dana Cadangan	3.455.030.000,00	3.762.208.484,00	91,11	1.544.970.000,00
3,	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	44.152.331,00	100	59.253.308,00

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp316.260.732.522,00) atau (79,23%) dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp399.174.884.807,00.

3.1.3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN-LRA

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan. Anggaran Pembentukan Dana Cadangan Tahun 2024 adalah sebesar Rp65.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp65.115.044.212,00 atau 100,18%. Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.29

Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan-LRA TA 2024

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Pengeluaran Pembiayaan	65.000.000.000,00	65.115.044.212,00	100,18	1.999.548.272,00
1,	Pembentukan Dana Cadangan	65.000.000.000,00	65.115.044.212,00	100,18	192.134.272,00
2,	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0	1.807.414.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp63.115.495.940,00 dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp1.999.548.272,00. Realisasi Pembentukan Dana Cadangan terdiri dari Belanja Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar Rp65.000.000.000,00 dan Pembiayan atas Pembentukan Dana Cadangan yang bersumber dari Bunga Dana Cadangan sebesar Rp115.044.212,00.

3.1.4 Pendapatan-LO

Penjelasan akun-akun Pendapatan Laporan Operasional (LO) menguraikan secara singkat mengenai saldo-saldo akun Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024. Pendapatan LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.589.730.093.122,24 yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.30

Rincian Pendapatan Daerah-LO per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Keterangan	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	PENDAPATAN DAERAH - LO	1.600.400.117.619,24	1.549.083.518.291,98	51.356.349.327,26	3,31
1,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	134.586.176.864,24	136.368.590.072,98	(1.782.413.208,74)	(1,30)
2,	PENDAPATAN TRANSFER-LO	1.460.194.290.755,00	1.412.675.178.219,00	47.519.112.536,00	3,36
3,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	5.619.650.000,00	0,00	5.619.650.000,00	100
4,	SURPLUS NON OPERASIONAL- LO	44.544.470,60	39.750.000,00	4.794.470,60	12,06

3.1.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 sebesar Rp134.586.176.864,24 terdiri atas 3 (tiga) jenis PAD yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.31

Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Keterangan	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	134.586.176.864,24	136.368.590.072,98	(1.782.413.208,74)	(1,30)
1,	Pajak Daerah-LO	77.363.296.053,00	80.267.491.271,00	(2.904.195.218,00)	(3,61)
2,	Hasil	47.554.463.842,00	46.609.876.486,52	944.587.355,48	2,02

	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO				
3,	Lain-lain PAD yang Sah-LO	9.668.416.969,24	9.491.222.315,46	177.194.653,78	1.86

3.1.4.1.1 PAJAK DAERAH-LO

Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp77.363.296.053,00 terdiri atas pendapatan dari 5 (lima) jenis pajak, adapun Pajak Hotel, Restaurant, Hiburan, Penerangan Jalan dan Parkir Tahun 2024 masuk ke PBJT, rincian pendapatan pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 3.32

Rincian Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Keterangan	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Pajak Daerah-LO	77.363.296.053,00	80.267.491.271,00	(2.904.195.218,00)	(3,61)
1,	Pajak Hotel-LO	0	280.929.388,00	(280.929.388,00)	(100)
2,	Pajak Restoran-LO	0	3.490.448.610,00	(3.490.448.610,00)	(100)
3,	Pajak Hiburan-LO	0	98.912.750,00	(98.912.750,00)	(100)
4,	Pajak Reklame-LO	733.484.307,00	978.396.025,00	(244.911.718,00)	(25,03)
5,	Pajak Penerangan Jalan-LO	0	22.034.673.765,00	(22.034.673.765,00)	(100)
6,	Pajak Parkir-LO	0	170.319.201,00	(170.319.201,00)	(100)
7,	Pajak Air Tanah-LO	430.781.495,00	314.594.895,00	116.186.600,00	36,93
8,	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)-LO	28.813.558.168,00	27.106.592.274,00	1.706.965.894,00	6,29
9,	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	17.572.220.275,00	25.792.624.363,00	(8.220.404.088,00)	(31,87)
10	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	29.813.251.808,00	0	29.813.251.808,00	100

3.1.4.1.2 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN-LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 sebesar Rp47.554.463.842,00 merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha) berupa penerimaan dividen, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.33

Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Keterangan	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	47.554.463.842,00	46.609.876.486,52	944.587.355,48	2,02
1,	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	47.554.463.842,00	46.609.876.486,52	944.587.355,48	2,02

3.1.4.1.3 LAIN-LAIN PAD YANG SAH-LO

Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp9.668.416.969,24 merupakan PAD yang tidak termasuk selain kedua kategori di atas, Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 terdiri atas 8 (delapan) jenis pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.34

Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Keterangan	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Lain-lain PAD yang Sah-LO	9.668.416.969,24	9.491.222.315,46	177.194.653,78	1,86
1,	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	405.608.200,00	(405.608.200,00)	(100)
2,	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.990.106.486,24	1.899.740.573,46	90.365.912,78	4,75
3,	Jasa Giro-LO	307.524.577,00	309.851.264,00	(2.326.687,00)	(0,75)

No	Keterangan	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
4,	Pendapatan Bunga-LO	5.392.673.662,00	5.133.207.463,00	259.466.199,00	5,05
5,	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	0,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(100)
6,	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	78.249.381,00	469.938.947,00	(391.689.566,00)	(83,35)
7,	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	281.385.076,00	513.189.624,00	(231.804.548,00)	(45,16)
8,	Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.618.477.787,00	755.186.244,00	863.291.543,00	114,31

3.1.4.2 PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya berupa Dana Perimbangan, Insentif Fiskal, Dana Desa, Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Transfer Tahun 2024 sebesar Rp1.460.194.290.755,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.35

Rincian Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Keterangan	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Pendapatan Transfer	1.460.194.290.755,00	1.412.675.178.219,00	47.519.112.536,00	3,36
1,	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.272.438.951.150,00	1.273.715.603.532,00	(1.276.652.382,00)	(0,10)
2,	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	187.755.339.605,00	138.959.574.687,00	48.795.764.918,00	35,11

3.1.4.2.1 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.272.438.951.150,00 yang merupakan transfer dari Pemerintah Pusat yang terdiri atas Dana Perimbangan dan Insentif Fiskal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.36

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Keterangan	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.272.438.951.150,00	1.273.715.603.532,00	(1.276.652.382,00)	(0,10)
1,	Dana Perimbangan-LO	1.243.937.847.150,00	1.244.332.344.532,00	(394.497.382,00)	(0,03)
2,	Insentif Fiskal-LO	28.501.104.000,00	0,00	28.501.104.000,00	100

3.1.4.2.2 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan penerimaan uang dari Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya berupa Bantuan Keuangan dan Pendapatan bagi hasil seperti Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok, Pendapatan Transfer Antar Daerah dari Pemerintah Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp187.755.339.605,00 sedangkan pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi merealisasikan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp138.959.574.687,00. Realisasi Pendapatan transfer antar daerah tahun 2024 naik sebesar Rp48.795.764.918,00 atau 35,11%.

Tabel 3.37

Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Keterangan	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	187.755.339.605,00	138.959.574.687,00	48.795.764.918,00	35,11
1,	Pendapatan Bagi Hasil-LO	128.233.975.605,00	126.285.467.184,00	1.948.508.421,00	1,54
2,	Bantuan Keuangan	59.521.364.000,00	12.674.107.503,00	46.847.256.497,00	369,62

3.1.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah dari sumber lain yaitu pendapatan hibah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.000.000.000,00.

Tabel 3.38

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Keterangan	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	5.619.650.000,00	0	5.619.650.000,00	100
1,	Pendapatan Hibah-LO	5.619.650.000,00	0	5.619.650.000,00	100

3.1.5 BEBAN - LO

Tabel 3.39

Rincian Beban-LO per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Keterangan	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	BEBAN DAERAH	179.652.605.555,67	21.522.255.758,13	158.130.349.797,54	734,72
1,	BEBAN OPERASI	20.541.229.605,40	20.396.839.395,00	144.390.210,40	0,70
1,a	Beban Pegawai - LO	17.132.767.059,00	16.549.686.657,00	583.080.402,00	3,52
1,b	Beban Barang dan Jasa	3.240.174.578,00	3.649.206.275,00	(409.031.697,00)	(11,20)
1,c	Beban Penyisihan Piutang	168.287.968,40	197.946.463,00	(29.658.494,60)	(14,98)
1,d	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.127.297.425,27	1.125.416.363,13	1.881.062,14	0,16
2,	BEBAN TRANSFER	157.984.078.525,00	0,00	157.984.078.525,00	100
2,a	Beban Bagi Hasil	8.753.922.170,00	0,00	8.753.922.170,00	100
2,b	Beban Bantuan Keuangan	149.230.156.355,00	0,00	149.230.156.355,00	100
3,	BEBAN TIDAK TERDUGA				

No	Keterangan	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
3,a	Beban Tidak Terduga	0,00	0,00	0	

Beban Daerah Tahun 2024 Rp179.652.605.555,67 naik 734,72% dari Beban Daerah Tahun 2023 yang realisasinya Rp21.522.255.758,13. Beban Daerah Tahun 2024 terdiri dari Beban Operasi dan Beban Transfer.

3.1.6 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Komposisi dan nilai saldo Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.830.027.554.790,14 yang tersaji sebagai berikut:

Tabel 3.40
Saldo Aset-Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	ASET	1.830.027.554.790,14	463.943.302.824,13	1.366.084.251.966,01	294,45
1,	Aset Lancar	1.378.039.883.767,60	90.655.413.743,00	1.287.384.470.024,60	1420,09
2,	Investasi Jangka Panjang	232.958.887.949,10	227.509.376.844,50	5.449.511.105,60	2,40
3,	Aset Tetap	150.854.994.573,44	136.115.575.964,63	14.739.418.608,81	10,83
4,	Dana Cadangan	65.000.000.000,00	3.647.164.272,00	61.352.835.728,00	1682,21
5,	Aset Lainnya	66.500,00	2.842.050.000,00	(2.841.983.500,00)	(99,99)
6.	Properti Investasi	3.173.722.000,00	3.173.722.000,00	0,00	0

3.1.6.1 ASET LANCAR

Aset lancar BPKPAD Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.378.039.883.767,60 Aset lancar BPKPAD Kabupaten

Temanggung pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.287.384.470.024,60 atau 1420,09 dari TA 2023 sebesar Rp90.655.413.743,00. Aset lancar BPKPAD Kabupaten Temanggung dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.41
Saldo Aset Lancar-Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Jenis Aset Lancar	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	ASET LANCAR	1.378.039.883.767,60	90.655.413.743,00	1.287.384.470.024,60	1420,09
1,	Kas dan Setara Kas	1.365.596.578.290,00	78.072.662.747,00	1.287.523.915.543,00	1649,14
2,	Piutang Pajak Daerah	4.632.981.837,50	3.857.178.227,50	775.803.610,00	20,11
3,	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	315.321.201,00	315.321.201,00	0,00	0
4,	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.800.311.463,00	2.669.417.662,00	130.893.801,00	4,90
5,	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	3.714.596.000,00	(3.714.596.000,00)	(100)
6,	Piutang Transfer Antar Daerah	6.862.854.722,00	4.055.574.029,00	2.807.280.693,00	69,22
7,	Penyisihan Piutang	(2.400.141.074,90)	(2.249.428.866,50)	(150.712.208,40)	6,70
8.	Persediaan	232.127.329,00	220.092.743,00	12.034.586,00	5,47

Penjelasan :

- Kas dan Setara Kas

Nama Rekening	Jumlah (Rp)
Kas di Kas Daerah	1.378.039.883.767,60
Kas di Bendahara Penerimaan	181.764.926,00
Jumlah	1.378.221.648.693,60

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 adalah Rp1.378.039.883.767,60 yang merupakan akumulasi dari seluruh saldo kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) yang terdiri dari Nomor Rekening RKUD KAB. TEMANGGUNG. BPD

Bank Jateng 1.014.00103.1 per 31 Desember 2024 yang telah direkonsiliasikan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	Kas di Daerah	1.378.039.883.767,60	78.072.662.747,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	181.764.926,00	0

Kas dibendahara penerimaan masih terdapat saldo Rp181.764.926,00 yang belum disetorkan karena ada permasalahan proses pemindahbukuan pada Bank Jateng.

● Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.632.981.837,50 merupakan kewajiban pihak ketiga atas pajak daerah yang hingga 31 Desember 2024 belum disetor oleh wajib pajak ke rekening kas daerah, dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp3.857.178.227,50 mengalami kenaikan sebesar 20,11%, piutang pajak tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Nama Rekening	Tahun 2023	Tahun 2024
Piutang Pajak Hotel	850.000,00	0,00
Piutang Pajak Restoran	24.502.744,00	0,00
Piutang Pajak Hiburan	1.325.000,00	0,00
Piutang Pajak Reklame	72.938.552,50	89.030.405,50
Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.942.285.734,00	0,00
Piutang Pajak Parkir	20.660.300,00	0,00
Piutang Pajak Air Tanah	0,00	2.373.860,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.607.720,00	5.607.720,00
Piutang PBB-P2	1.788.244.509,00	2.344.555.527,00
Piutang BPHTB	763.668,00	763.668,00
Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	2.190.650.657,00
Jumlah	3.857.178.227,50	4.632.981.837,50

- Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp315.321.201,00 yang terdiri atas Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

- Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Saldo Piutang Lain – Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.800.311.463,00. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dapat dirinci sebagai berikut:

Nama Rekening	Jumlah (Rp)
Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.025.000,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	702.219.436,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	<u>2.096.067.027,00</u>
Jumlah	2.800.311.463,00

- Piutang Transfer Antar Daerah
Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.862.854.722,00.

- Penyisihan Piutang
Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar (Rp2.400.291.074,90). Adapun saldo penyisihan piutang tersebut berasal dari Penyisihan Piutang Pendapatan.

- Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset Lancar Persediaan pada akhir Tahun 2024 senilai Rp232.127.329,00 terdiri dari persediaan barang pakai habis dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.577.750,00	5.577.750,00	0,00	0,00
Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Tulis Kantor	137.814.798,00	15.604.122,00	122.210.676,00	783
Kertas dan Cover	14.548.520,00	19.841.610,00	(5.293.090,00)	(26,68)
Bahan Cetak	37.449.500,00	128.151.735,00	(90.702.235,00)	(70,78)
Benda Pos	3.350.000,00	2.590.000,00	760.000,00	29,34
Bahan Komputer	29.145.905,00	42.277.776,00	(13.131.871,00)	(31,16)
Perabot Kantor	1.996.596,00	1.395.000,00	601.596,00	0,43
Alat Listrik	2.244.260,00	4.654.750,00	(2.410.490,00)	(51,78)
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pakan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	232.127.329,00	220.092.743,00	12.034.586,00	5,47

3.1.6.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi Jangka Panjang yang dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung berbentuk Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang Permanen yang berupa penyertaan modal. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp232.958.887.949,10 sedangkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp227.509.376.844,50 bertambah sebesar Rp5.449.511.104,60 atau sebesar 2,40%. Investasi Jangka Panjang BPKPAD Kabupaten Temanggung dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.42

Saldo Investasi Jangka Panjang-Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Jenis Investasi Jangka Panjang	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	INVESTASI JANGKA PANJANG	232.958.887.949,10	227.509.376.844,50	5.449.511.104,60	2,40
1,	Investasi Jangka Panjang Non Permanen (Dana Bergulir)	99.121.304,10	116.154.924,50	(17.033.620,40)	(14,66)
2,	Investasi Jangka Panjang Permanen (Penyertaan Modal)	232.859.766.645,00	227.393.221.920,00	5.466.544.725,00	2,40

Penjelasan:

- Investasi Jangka Panjang Non Permanen dari Tahun 2024 mengalami penurunan (Rp17.033.620,40) atau turun (14,66%) dibanding Tahun 2023 akibat dana bergulir kepada masyarakat di Tahun 2024.
- Investasi Jangka Panjang Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Jangka Panjang Permanen yang dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 berupa penyertaan modal BUMD sebesar Rp232.859.766.645,00 dimana jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.466.544.725,00 atau 2,40%.

3.1.6.3 ASET TETAP

Aset Tetap merupakan aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material. Dalam perhitungan Neraca BPKPAD Kabupaten Temanggung, Aset Tetap terdiri atas: (1) Tanah; (2) Peralatan dan Mesin; (3) Gedung dan Bangunan; (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan; (5) Aset Tetap Lainnya; dan (6) Akumulasi Penyusutan. Nilai Aset Tetap BPKPAD Kabupaten Temanggung disajikan sesuai dengan harga perolehan realisasi belanja modal dan kapitalisasi dari harga perolehan realisasi selain dari belanja modal seperti honor tim pengadaan, jasa pihak ketiga (jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan) dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka perolehan aset tetap tersebut. Saldo aset tetap BPKPAD Kabupaten Temanggung per tanggal 31

Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp150.854.994.573,44 dan sebesar Rp136.115.575.964,63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.43

Saldo Aset Tetap-Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Jenis Aset Tetap	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	ASET TETAP	150.854.994.573,44	136.115.575.964,63	14.739.418.608,81	10,83
1,	Tanah	128.977.350.162,00	113.909.419.442,00	15.067.930.720,00	13,23
2,	Peralatan dan Mesin	9.678.360.556,00	8.131.572.918,00	1.546.787.638,00	19,02
3,	Gedung dan Bangunan	25.503.617.601,00	26.011.012.601,00	(507.395.000,00)	(1,95)
4,	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.859.611.249,00	1.859.611.249,00	0,00	0
5,	Aset Tetap Lainnya	17.108.000,00	143.674.500,00	(126.566.500,00)	(88,09)
6,	Konstruksi dalam pengerjaan				
7,	Aset Lainnya	66.500,00	2.842.050.000,00	(2.841.983.500,00)	(99,99)
9,	Properti Investasi	3.173.722.000,00	3.173.722.000,00	0,00	0
10,	Akumulasi Penyusutan	(15.181.052.994,56)	(13.939.714.745,37)	1.241.338.249,19	8,91

Penjelasan :

- Aset Tetap berupa Tanah BPKPAD Kabupaten Temanggung merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Nilai Aset Tanah Tahun 2024 sebesar Rp128.977.350.162,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp113.909.419.442,00 untuk nilai Aset Tanah mengalami perubahan sebagai berikut:

HIBAH PIHAK KE-3

1.	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek - Perum Pesina Abepura 2, Kelurahan Tlogorejo Kecamatan Temanggung	Rp. 452.000.000.00
2.	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek - Perum Amandika Tisna Town House, Kelurahan Purworejo Kecamatan Temanggung	Rp. 2.736.500.000.00
3.	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek - Perum Balizan Garden, Kelurahan Mungseng Kecamatan Temanggung	Rp. 431.150.000.00

Mutasi Masuk

1.	BAGIAN PEMERINTAHAN Tanah Bangunan Kantor Pemerintah - Pembangunan Pasarn Hewan Ngadirejo	Rp. 10.535.715.000.00
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah - Pembangunan Koramil Kedu	Rp. 324.112.560.00
3.	Daerah Sempadan Sumber Air - Sumber Mata Air Pdam	Rp. 184.880.000.00
4.	Daerah Sempadan Sumber Air - Pembangunan Penguat Mata Air Kledung (sigandul)	Rp. 490.570.000.00
5.	Tanah Untuk Jalan Nasional - Pelebaran Jalan Dan Jembatan Papowan	Rp. 53.516.112.00
6.	Tanah Untuk Jalan Nasional - Pelebaran Jalan Dan Jembatan Sigandul	Rp. 3.339.542.612.00
7.	Tanah Untuk Jalan Propinsi - Pelebaran Jalan Depan Rm Sari Ayam	Rp. 915.914.500.00
8.	Tanah Untuk Jalan Kabupaten - Pelebaran Jalan Pertigaan Sari Ayam	Rp. 1.045.878.133.00
9.	Tanah Untuk Jalan Kabupaten - Pelebaran Jalan Dan Jembatan Sigandul	Rp. 873.401.112.00
10.	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi - Bendung Progopistan	Rp. 659.499.468.00
11.	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi - Di Progopistan	Rp. 1.311.690.000.00

12.	Alam Tanah Untuk Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah - Pikatan Water Park	Rp. 254.230.000.00
-----	---	--------------------

MUTASI KELUAR

1.	DINKOPDAG Tanah Bangunan Pasar Ngadirejo	Rp. 30.240.000.00
2.	DKK Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III - Rumdin Dokter	Rp. 77.165.350.00
3.	DINDIKPORA Tanah Bangunan Kantor Pemerintah - Kantor Uptd Dinas Pendidikan Tretep Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan - Sd Negeri 2 Mungseng Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan - Sd Negeri 1 Kupa Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka - Outdoor Dan Indoor (lapangan Tenis) Dan Untuk Jalan Masuk Indoor	Rp. 29.750.500.00 Rp. 171.296.000.00 Rp. 53.724.000.00 Rp. 468.960.000.00
4.	KEL. KRANGGAN Tanah Bangunan Kantor Pemerintah - Kantor Kelurahan Kranggan	Rp. 134.912.000.00
5.	DKPPP Tanah Bangunan Kantor Pemerintah - Knator Kecamatan Wonoboyo (lama) Tanah Bangunan Gedung Pemotongan Hewan - Rumah Potong Hewan Ngadirejo	Rp. 155.403.800.00 Rp. 50.000.000.00
6.	DPPPAPPKB Tanah Bangunan Kantor Pemerintah - Gedung Bkbpp Jumo	Rp. 86.906.141.00
7.	DPRKPLH Daerah Sempadan Sumber Air - Mata Air Rowali	Rp. 235.962.050.00

8.	Tanah Danau/Situ/Embung	Rp. 948.020.936.00
	BAG. UMUM SETDA Tanah Bangunan Gedung Pameran - Gedung Pemuda	Rp. 7.000.000.00
	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan - Gedung Pemuda Dan Kebudayaan	Rp. 1.541.328.000.00

KOREKSI

1.	Tanah Mento Candiroto (koreksi karena milik Provinsi dan sudah bersertifikat a.n. Pemprov Jateng)	Rp. 4.550.000.000.00
----	---	----------------------

- Aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Peralatan dan Mesin sampai siap pakai dan dikuasai, meliputi harga pembelian, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkannya agar dapat digunakan. Nilai peralatan dan mesin TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp9.678.360.556,00 dan Rp8.131.572.918,00. Mutasi aset peralatan dan mesin TA 2024 bertambah sebesar Rp1.546.787.638,00 naik 19,02%. Berikut mutasi aset tetap peralatan dan mesin Tahun 2024:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Per 1 Januari 2024	8.131.572.918,00
Mutasi Masuk	3.137.314.958,00
1. Meteran Air uk. 1 inch (2 x 950.000,00)	1.900.000,00
2. Meteran Air uk. 1,5 inch (2 x 3.050.000,00)	6.100.000,00
3. Meteran Air uk. 2 inch (3x 4.800.000,00)	14.400.000,00
4. Meteran Air uk. 3 inch (1 x 5.150.000,00)	5.150.000,00
5. Meteran Air uk. 4 inch (1 x 6.000.000,00)	6.000.000,00
6. Mesin antrian digital (1 x 16.983.000,00)	16.983.000,00

7.	AC (2 x 7.800.000,00)	15.600.000,00
8.	UPS (3 x 1.850.000,00)	5.550.000,00
9.	Mobil Innova Zenix AA 1307 XE dari Pengelola	436.998.900,00
10.	Sepeda Motor - HONDA/WIN/MCB (AA 9738 NE)	9.026.000,00
11.	Sepeda Motor - Honda GL Pro/ELM4 (AA 9734 JE)	9.000.000,00
12.	Sepeda Motor - Honda/GLP III (AA 9708 JE)	15.000.000,00
13.	Sepeda Motor - Suzuki Tunder/EN 125 A (AA 9721 ME)	16.000.000,00
14.	Sepeda Motor - Suzuki Shogun/FD 110 (AA 9796 LE)	10.500.000,00
15.	Sepeda Motor - Honda Win/MCB (AA 9797 ME)	12.000.000,00
16.	Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 781 DE)	11.015.000,00
17.	Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 780 DE)	11.015.000,00
18.	Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 778 DE)	11.015.000,00
19.	Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 777 DE)	11.015.000,00
20.	Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 776 DE)	11.015.000,00
21.	Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 775 DE)	11.015.000,00
22.	Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 774 DE)	11.015.000,00
23.	Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 773 DE)	11.015.000,00
24.	Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 772 DE)	11.015.000,00
25.	Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 771 DE)	11.015.000,00
26.	Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 770 DE)	11.015.000,00
27.	Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 769 DE)	11.015.000,00
28.	Sepeda Motor - Honda/Win/- (AA 9814 NE)	9.050.000,00
29.	Sepeda Motor - Honda/Win MCB (AA 9671 ME)	9.026.000,00
30.	Sepeda Motor - Honda/Win MCB (AA 9672 ME)	9.026.000,00
31.	Sepeda Motor - HONDA/NF 100 (AA 9822 LE)	10.820.000,00
32.	Station Wagon - Nissan/ X-Trail 25 2 WD CVT XT A/T/X-Trail 25 2 WD (AA 5 PN)	407.670.858,00
33.	Sepeda Motor - Honda/MCB (AA 9864 ME)	8.850.000,00
34.	Sepeda Motor - Honda/NF 100/supra (AA 9906 KE)	10.870.000,00
35.	Sepeda Motor - Honda/NF 100/supra (AA 9720 NE)	10.065.000,00

36.	Sepeda Motor - Honda/supra/NF 100 (AA 9686 ME)	7.500.000,00
37.	Sepeda Motor - Honda/win/MCB (AA 9677 KE)	9.000.000,00
38.	Sepeda Motor - HONDA/GL (AA 9933 JE)	4.400.000,00
39.	Sepeda Motor - Honda/GL (AA 9817 JE)	1.000.000,00
40.	Sepeda Motor - VIAR / VR 150 3R/Roda 3 (AA 9733 PE)	6.000.000,00
41.	Sepeda Motor - SUZUKI/FL 125 SD (AA 9837 NE)	12.082.600,00
42.	Sepeda Motor - Honda Win/Win (AA 9690 NE)	9.026.000,00
43.	Sepeda Motor - Honda /Win (AA 9689 NE)	9.026.000,00
44.	Sepeda Motor - Honda Win/Win (AA 9707 NE)	9.026.000,00
45.	Sepeda Motor - Honda /Win (AA 9705 NE)	9.026.000,00
46.	Station Wagon - HONDA/CRV (H 8 AY)	417.530.000,00
47.	Jeep - TOYOTA/FORTUNER2.4G (AA 14 E)	481.283.000,00
48.	Jeep - TOYOTA/FORTUNER2.4G (AA 13 E)	481.283.000,00
49.	Jeep - TOYOTA/FORTUNER2.4G (AA 12 E)	481.283.000,00
50.	Sepeda Motor SUZUKI / FL 125 SD ex. BKPSDM	12.082.600,00
Mutasi Keluar		1.590.527.320,00
1.	Mobil Toyota Rush AA 22 E ke Pengelola	247.100.000,00
2.	Sepeda Motor Honda/Win/MCB (AA 762 DE) - dihibahkan ke Muhammadiyah	8.100.000,00
3.	Sepeda Motor HONDA/GL15B1DF (AA 9655 JE)	9.000.000,00
4.	Sepeda Motor HONDA/GL15B1DF (AA 9839 PE)	17.826.862,00
5.	Sepeda Motor - HONDA/WIN/MCB (AA 9738 NE)	9.026.000,00
6.	Sepeda Motor - Honda GL Pro/ELM4 (AA 9734 JE)	9.000.000,00
7.	Sepeda Motor - Honda/GLP III (AA 9708 JE)	15.000.000,00
8.	Sepeda Motor - Suzuki Tunder/EN 125 A (AA 9721 ME)	16.000.000,00
9.	Sepeda Motor - Suzuki Shogun/FD 110 (AA 9796 LE)	10.500.000,00
10.	Sepeda Motor - Honda Win/MCB (AA 9797 ME)	12.000.000,00
13.	Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 781 DE)	11.015.000,00
14.	Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 780 DE)	11.015.000,00
15.	Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 778 DE)	11.015.000,00

16.	Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 777 DE)	11.015.000,00
17.	Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 776 DE)	11.015.000,00
18.	Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 775 DE)	11.015.000,00
19.	Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 774 DE)	11.015.000,00
20.	Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 773 DE)	11.015.000,00
21.	Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 772 DE)	11.015.000,00
22.	Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 771 DE)	11.015.000,00
23.	Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 770 DE)	11.015.000,00
24.	Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 769 DE)	11.015.000,00
25.	Sepeda Motor - Honda/Win/- (AA 9814 NE)	9.050.000,00
26.	Sepeda Motor - Honda/Win MCB (AA 9671 ME)	9.026.000,00
27.	Sepeda Motor - Honda/Win MCB (AA 9672 ME)	9.026.000,00
28.	Sepeda Motor - HONDA/NF 100 (AA 9822 LE)	10.820.000,00
29.	Station Wagon - Nissan/ X-Trail 25 2 WD CVT XT A/T/X-Trail 25 2 WD (AA 5 PN)	407.670.858,00
30.	Sepeda Motor - Honda/MCB (AA 9864 ME)	8.850.000,00
31.	Sepeda Motor - Honda/NF 100/supra (AA 9906 KE)	10.870.000,00
32.	Sepeda Motor - Honda/NF 100/supra (AA 9720 NE)	10.065.000,00
33.	Sepeda Motor - Honda/supra/NF 100 (AA 9686 ME)	7.500.000,00
34.	Sepeda Motor - Honda/win/MCB (AA 9677 KE)	9.000.000,00
35.	Sepeda Motor - HONDA/GL (AA 9933 JE)	4.400.000,00
36.	Sepeda Motor - Honda/GL (AA 9817 JE)	1.000.000,00
37.	Sepeda Motor - VIAR / VR 150 3R/Roda 3 (AA 9733 PE)	6.000.000,00
38.	Sepeda Motor - SUZUKI/FL 125 SD (AA 9837 NE)	12.082.600,00
39.	Sepeda Motor - Honda Win/Win (AA 9690 NE)	9.026.000,00
40.	Sepeda Motor - Honda /Win (AA 9689 NE)	9.026.000,00
41.	Sepeda Motor - Honda Win/Win (AA 9707 NE)	9.026.000,00
42.	Sepeda Motor - Honda /Win (AA 9705 NE)	9.026.000,00
43.	Station Wagon - HONDA/CRV (H 8 AY)	417.530.000,00
44.	Sedan TIMOR/S515-I (AA 9502 AE)	60.000.000,00

45.	Minibus Mazda/E2000/E2000 (AA 9591 NE)	40.000.000,00
46.	Mobil Toyota Kijang (AA 9504 ME)	35.800.000,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024		9.678.360.556,00

- Aset tetap berupa gedung dan bangunan yang dimiliki oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan sampai dengan siap pakai dan dikuasai meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak, serta biaya konstruksi dalam kontrak dan biaya lain yang berkaitan dalam memperoleh aset tersebut, Nilai gedung dan bangunan TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp25.503.617.601,00 dan Rp26.011.012.601,00 untuk nilai Aset Gedung dan Bangunan mengalami perubahan. Berikut mutasi aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2024:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Per 1 Januari 2024	26.011.012.601,00
Mutasi Masuk	0
Mutasi Keluar	507.395.000,00
Gedung Eks. Korpri, Lingkungan Setda	507.395.000,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	25.503.617.601,00

- Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung, merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai, dalam nilai tersebut tidak termasuk nilai tanah, Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp1.859.611.249,00 dan Rp1.859.611.249,00. Tidak ada mutasi aset tetap lainnya pada TA 2024
- Aset tetap berupa aset tetap lainnya yang dimiliki oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai, Aset Tetap Lainnya merupakan seluruh Aset Tetap yang tidak dapat diklasifikasi dengan tepat ke dalam aset tetap

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, atau jalan irigasi dan jaringan, Nilai aset tetap lainnya TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp17.108.000,00 dan Rp143.674.500,00 berkurang Rp126.500.000,00 karena Penghapusan Barang Koleksi Rumah Tangga dan Rp66.500,00. reklas Buku Sejarah Temanggung, H. Bowo Asiatno, Sh. Msi. ke aset lain.

- Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan dari beban penyusutan periodik, Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset, Akumulasi penyusutan aset tetap BPKPAD Kabupaten Temanggung TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar (Rp15.181.052.994,56) dan (Rp13.939.714.745,37). Berikut rincian akumulasi penyusutan aset tetap BPKPAD Kabupaten Temanggung TA 2024:

ASET TETAP	SALDO TA 2023 (Rp)	PENYUSUTAN TA 2024	KOREKSI ATAS MUTASI	SALDO TA 2024 (Rp)
Akumulasi Penyusutan	(13.939.714.745,37)	1.241.338.249,19	0,00	(15.181.052.994,56)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.590.107.147,02)	973.151.803,06	0,00	(8.563.258.950,08)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(5.345.328.331,43)	331.025.228,82	0,00	(5.676.353.560,25)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(861.779.266,92)	63.661.217,31	0,00	(925.440.484,23)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(142.500.000,00)	126.500.000,00	0,00	(16.000.000,00)

3.1.6.4 DANA CADANGAN

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan di Tahun 2024 akan digunakan untuk Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Kab. Temanggung. Dana Cadangan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp3.647.164.272,00 dan di Tahun 2024 Rp65.000.000.000,00.

3.1.6.5 ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah Aset Non Lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tak Berwujud yang tidak dapat diklasifikasikan menjadi aset lancar ataupun aset tetap. Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp66.500,00 dan Rp2.842.050.000,00 Aset Lainnya ini terdiri dari (1) Aset Tidak Berwujud, (2) Aset Lain-lain, (3) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, (4) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya, (5) Kas Yang Dibatasi Penggunaannya, dan (6) Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF). Aset Lainnya dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 3.44

Saldo Aset Lainnya-Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Aset Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	ASET LAINNYA	66.500,00	2.842.050.000,00	(2.841.983.500,00)	(99,99)
1,	Aset Tidak Berwujud	507.306.693,00	507.306.693,00	0,00	0
2,	Aset Lain-lain	2.014.380.888,00	743.996.530,00	1.270.384.358,00	170,75
3,	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(507.306.693,00)	(507.306.693,00)	0,00	0
4,	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.014.314.388,00)	(743.996.530,00)	(1.270.317.858,00)	(170,74)
5,	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	12.795.000,00	(12.795.000,00)	(100)
6,	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	2.829.255.000,00	(2.829.255.000,00)	(100)

Penjelasan :

- Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan, serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp507.306.693,00 dan Tahun 2023 Rp507.306.693,00 untuk ATB di Tahun 2024 sama dengan Tahun 2023.

- Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp2.014.380.888,00 dan Rp743.996.530,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Uraian	
Saldo Awal Per 1 Januari 2024	743.996.530,00
Mutasi Masuk	66.500,00
Buku Sejarah Temanggung, H, Bowo Asiatno, Sh, Msi,	
Mutasi Masuk Aset Lainnya dari BAG. UMUM SETDA dan DPUPR	13.900.000,00
Reklasifikasi aset kendaraan ke aset lainnya Sedan TIMOR/S515-I (AA 9502 AE), Minibus Mazda/E2000/E2000 (AA 9591 NE), Mobil Toyota Kijang (AA 9504 ME)	135.800.000,00
Reklasifikasi almes ke aset lainnya dari KEC. WONOBOYO, BAPPEDA, BAG. UMUM SETDA, BAG. PROKOMPIM SETDA ,BAG. ORGANISASI SETDA, BAG. PEMERINTAHAN SETDA, DPUPR, DINKOPDAG, KEC. BULU, DINBUDPAR.	1.172.700.458,00
Mutasi Keluar	40.000.000,00
Penghapusan Aset Tak Berwujud berupa Software Sistem Informasi Akuntansi Keuangan daerah (Sentralistik) Permanen	
Reklasifikasi aset lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Sepeda Motor SUZUKI / FL 125 SD ex. BKPSDM	12.082.600,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	2.014.380.888,00

- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp507.306.693,00 dan Rp507.306.693,00, untuk Aset Amortisasi di Tahun 2024 sama, tidak ada mutasi.

- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp2.014.314.388,00 dan Rp743.996.530,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp1.270.317.858,00 dengan rincian sebagai berikut:

ASET LAINNYA	SALDO TA 2023 (RP)	PENYUSUTAN TA 202	KOREKSI ATAS MUTASI	SALDO TA 2024 (RP)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(743.996.530,00)			(2.014.314.388,00)
Sepeda Motor HONDA/WIN MCB (AA 9929 KE)	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)
MOTOR RB AA6310XN	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(4.000.000,00)
MOTOR AA9651LE	0,00	0,00	(4.900.000,00)	(4.900.000,00)
Sedan TIMOR/S515-I (AA 9502 AE)	0,00	0,00	(60.000.000,00)	(60.000.000,00)
Minibus Mazda/E2000/E2000 (AA 9591 NE)	0,00	0,00	(40.000.000,00)	(40.000.000,00)
Mobil Toyota Kijang (AA 9504 ME)	0,00	0,00	(35.800.000,00)	(35.800.000,00)
Sepeda Motor - HONDA/WIN/MCB (AA 9738 NE)	0,00	0,00	(9.026.000,00)	(9.026.000,00)
Sepeda Motor - Honda GL Pro/ELM4 (AA 9734 JE)	0,00	0,00	(9.000.000,00)	(9.000.000,00)
Sepeda Motor - Honda/GLP III (AA 9708 JE)	0,00	0,00	(15.000.000,00)	(15.000.000,00)
Sepeda Motor - Suzuki Tunder/EN 125 A (AA 9721 ME)	0,00	0,00	(16.000.000,00)	(16.000.000,00)
Sepeda Motor - Suzuki Shogun/FD 110 (AA 9796 LE)	0,00	0,00	(10.500.000,00)	(10.500.000,00)
Sepeda Motor - Honda Win/MCB (AA 9797 ME)	0,00	0,00	(12.000.000,00)	(12.000.000,00)
Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 781 DE)	0,00	0,00	(11.015.000,00)	(11.015.000,00)

Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 780 DE)	0,00	0,00	(11.015.000,00)	(11.015.000,00)
Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 778 DE)	0,00	0,00	(11.015.000,00)	(11.015.000,00)
Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 777 DE)	0,00	0,00	(11.015.000,00)	(11.015.000,00)
Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 776 DE)	0,00	0,00	(11.015.000,00)	(11.015.000,00)
Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 775 DE)	0,00	0,00	(11.015.000,00)	(11.015.000,00)
Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 774 DE)	0,00	0,00	(11.015.000,00)	(11.015.000,00)
Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 773 DE)	0,00	0,00	(11.015.000,00)	(11.015.000,00)
Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 772 DE)	0,00	0,00	(11.015.000,00)	(11.015.000,00)
Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 771 DE)	0,00	0,00	(11.015.000,00)	(11.015.000,00)
Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 770 DE)	0,00	0,00	(11.015.000,00)	(11.015.000,00)
Sepeda Motor - Yamaha/YT115 (AA 769 DE)	0,00	0,00	(11.015.000,00)	(11.015.000,00)
Sepeda Motor - Honda/Win/- (AA 9814 NE)	0,00	0,00	(9.050.000,00)	(9.050.000,00)
Sepeda Motor - Honda/Win MCB (AA 9671 ME)	0,00	0,00	(9.026.000,00)	(9.026.000,00)
Sepeda Motor - Honda/Win MCB (AA 9672 ME)	0,00	0,00	(9.026.000,00)	(9.026.000,00)
Sepeda Motor - HONDA/NF 100 (AA 9822 LE)	0,00	0,00	(10.820.000,00)	(10.820.000,00)
Station Wagon - Nissan/ X-Trail 25 2 WD CVT XT A/T/X-Trail 25 2 WD (AA 5 PN)	0,00	0,00	(407.670.858,00)	(407.670.858,00)
Spd Motor - Honda/MCB	0,00	0,00	(8.850.000,00)	(8.850.000,00)

(AA 9864 ME)

Sepeda Motor - Honda/NF 100/supra (AA 9906 KE)	0,00	0,00	(10.870.000,00)	(10.870.000,00)
Sepeda Motor - Honda/NF 100/supra (AA 9720 NE)	0,00	0,00	(10.065.000,00)	(10.065.000,00)
Sepeda Motor - Honda/supra/NF 100 (AA 9686 ME)	0,00	0,00	(7.500.000,00)	(7.500.000,00)
Sepeda Motor - Honda/win/MCB (AA 9677 KE)	0,00	0,00	(9.000.000,00)	(9.000.000,00)
Sepeda Motor - HONDA/GL (AA 9933 JE)	0,00	0,00	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
Sepeda Motor - Honda/GL (AA 9817 JE)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
Sepeda Motor - VIAR / VR 150 3R/Roda 3 (AA 9733 PE)	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)
Sepeda Motor - SUZUKI/FL 125 SD (AA 9837 NE)	0,00	0,00	(12.082.600,00)	(12.082.600,00)
Sepeda Motor - Honda Win/Win (AA 9690 NE)	0,00	0,00	(9.026.000,00)	(9.026.000,00)
Sepeda Motor - Honda /Win (AA 9689 NE)	0,00	0,00	(9.026.000,00)	(9.026.000,00)
Sepeda Motor - Honda Win/Win (AA 9707 NE)	0,00	0,00	(9.026.000,00)	(9.026.000,00)
Sepeda Motor - Honda /Win (AA 9705 NE)	0,00	0,00	(9.026.000,00)	(9.026.000,00)
Station Wagon - HONDA/CRV (H 8 AY)	0,00	0,00	(417.530.000,00)	(417.530.000,00)
Sepeda Motor SUZUKI / FL 125 SD ex. BKPSDM	0,00	0,00	12.082.600,00	12.082.600,00
Software Sistem Informasi Akuntansi Keuangan daerah (Sentralistik) Permanen	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00

- Kas Yang Dibatasi Penggunaannya adalah sejumlah uang yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas. Kas yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek. Kas Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp0,00 dan Rp12.795.000,00 Mengalami penurunan sebesar Rp12.795.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Per 1 Januari 2024	12,795,000,00
Penambah	0,00
Penerimaan kas daerah yang bersumber dari dana BOP kesetaraan yang belum disetorkan ke RKUN	0,00
Pengurang	(12.795.000,00)
Mencatat penyetoran ke RKUN atas uang titipan dari BOP PKBM Mergoraharjo	(12.795.000,00)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	0,00

3.1.6.6 PROPERTI INVESTASI

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa dengan tujuan administratif. Properti Investasi yang ada pada BPKPAD Kabupaten Temanggung TA 2024 adalah Properti Investasi Tanah sebesar Rp3.173.722.000,00

3.1.7 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek antara lain dapat berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Kewajiban BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah Kewajiban

Jangka Pendek dengan saldo per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.531.125.429,39 dan Rp3.534.492.205,63. Saldo tersebut merupakan kewajiban jangka pendek BPKPAD Kabupaten Temanggung yang masih terhutang sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.45

Saldo Kewajiban - Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Keterangan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.531.125.429,39	3.534.492.205,63	(3.366.776,24)	(0,09)
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0	0	0
1.a	Pendapatan Diterima Dimuka	2.441.805.110,39	2.112.087.555,63	329.717.554,76	15,61
1.b	Utang Belanja	1.089.320.319,00	1.409.609.650,00	(320.289.331,00)	(22,72)
1.c	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	12.795.000,00	(12.795.000,00)	(100)

Penjelasan :

- Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa sebesar Rp2.441.805.110,39 sedangkan pada Tahun 2023 merupakan Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III sebesar Rp2.112.087.555,63 sehingga Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 tetap. Pendapatan Diterima Dimuka dirinci sebagai berikut:

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	2.441.805.110,39
Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	2.441.805.110,39
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	201.434.116,51
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah	1.901.217.394,88
Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Reklame	339.153.599,00

- Utang Belanja
Utang belanja BPKPAD Kabupaten Temanggung TA 2024 sebesar Rp1.089.320.319,00 yang terdiri atas utang belanja pegawai (Rp1.019.589.227,00) dan utang belanja barang dan jasa (Rp69.731.092,00). Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut:

UTANG BELANJA	1.089.320.319,00
----------------------	-------------------------

Utang Belanja Pegawai	1.019.589.227,00
-----------------------	-------------------------

Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	206.870.373,00
---	----------------

Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	723.523.123,00
--	----------------

Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	10.794.201,00
--	---------------

Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	3.529.865,00
--	--------------

Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	319.020.000,00
--	----------------

Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	390.179.057,00
---	----------------

Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	89.195.731,00
--	---------------

Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	1.340.062,00
--	--------------

Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	438.220,00
--	------------

Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	39.000.000,00
--	---------------

Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	48.417.449,00
---	---------------

(PBJT)

Utang Belanja Barang dan Jasa	69.731.092,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	30.000.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	12.250.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	10.800.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	604.407,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.000.300,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	15.076.385,00

- Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

3.1.8 Ekuitas Dana

Tabel 3.46

Saldo Ekuitas-Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1,	Ekuitas Awal	460.408.810.618,50	473.331.328.195,71
2,	Surplus / (Defisit) LO	1.420.792.056.534,17	1.362.862.376.698,85
3,	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	0,00	0,00
4,	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	(23.987.983.106,04)	(1.285.457.707.536,00)
5,	Ekuitas Akhir	1.857.212.884.046,63	460.408.810.618,50

Transaksi yang menyebabkan perubahan ekuitas Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo Awal	460.408.810.618,50
Penambah	1.420.792.056.534,17
Pengurang	(23.987.983.106,04)
EKUITAS	460.408.810.618,50
Surplus / (Defisit) LO	1.420.792.056.534,17
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	(0,00)

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	(23.967.983.106,04)
EKUITAS 31 DESEMBER 2024	460.408.810.618,50

3.2 Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD.

Laporan keuangan BPKPAD adalah laporan keuangan gabungan dengan SKPKD (untuk Aset saat ini baru OPD) sehingga nilai yang dilaporkan adalah hasil konsolidasi antara OPD dengan SKPKD.

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN SKPD

A. Domisili dan bentuk hukum

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 94 Temanggung dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.

C. Dasar Hukum Operasional Kegiatan

- 1, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung.
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung no 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
- 3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

D. Pejabat Struktural selama tahun berjalan

Pada akhir tahun 2024, susunan Pejabat Eselon II, Eselon III & Eselon IV sebagai berikut:

Tabel 4.1
Susunan Pejabat Struktural Tahun 2024

No	Eselon	Jabatan	Nama Pejabat
1	Eselon II/b	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	TRI WINARNO, S.E.,M.M.

No	Eselon	Jabatan	Nama Pejabat
2	Eselon III/a	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	HUSEIN TSANI UBADDILLAH, SE, M.Si
3	Eselon III/b	KEPALA BIDANG AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN	Dra. DYAH EKIANA JUDHANINGRUM, M.Si.
4	Eselon III/b	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	YUSI SUSANTI, SIP, MM
5	Eselon III/b	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	HILMY TINIKE DHAMAYANTI, SE, MM
6	Eselon III/b	KEPALA BIDANG PENGANGGARAN	EKO GUNADI, S.Sos., M.Si.
7	Eselon III/b	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN	KARTIKA SARI, ST, M.Eng
8	Eselon III/b	KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN	YUSUF BANGUN CAHYONO, SE.
9	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN KEUANGAN	ABDUL ROCHMAN, S.Kom.
10	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI	ZIADATUN NI'MAH, SE, M.Acc.
11	Eselon IV/a	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	NELY NIAMAH HANI, S.Sos, MM
12	Eselon IV/a	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	IWAN ADY, S.AP.
13	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG KAS DAERAH	NURUL LAILY PRIYANSEPTI, SE
14	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN BELANJA	LUTFI AMALIYAH, SE
15	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN	YANUAR ACHMAD CHOLID, S.Kom
16	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	JOKO PRAMONO, SST, MSi.
17	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG ADMINISTRASI ANGGARAN	KETUT WAHYU ARDHIYANTO, S.E., M.M.
18	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	KARTINI YOGANINGSIH, SE, MM
19	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN PENETAPAN	TEGUH SUPRIYANTO, SE, M.Si
20	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PEMBERDAYAAN BARANG MILIK DAERAH	MUHAMMAD KHANIFUDIN, S.E.
21	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH	ABDUL ROUF DAROJAT, S.Kom
22	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN	ISKAK, SE

BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan Pengelolaan keuangan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang meliputi keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah memerlukan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

Kelancaran kegiatan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan yang dilaksanakan selama Tahun anggaran 2024 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah dalam menangkap aspirasi dan kreasi maupun dalam teknik pelaksanaannya.

TEMANGGUNG, 14 AGUSTUS 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang



TRI WINARNO, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 197310201999031005